



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



S.J.O.I. MUMUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 45/Kpts/PD.200/1/2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN CABAI, BAWANG MERAH, DAN JERUK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/3/2012 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, perlu menetapkan Kawasan Pertanian Nasional;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk pengembangan kawasan hortikultura nasional, perlu menetapkan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada setiap lokasi dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan kelas dan tahapan pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.
- KETIGA : Perencanaan pembangunan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional mencakup penyediaan prasarana, sarana penunjang, teknologi, pembiayaan, pengolahan, pemasaran serta kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolanya.
- KEEMPAT : Guna menyusun rancangan pengembangan kawasan, Eselon I yang menangani penelitian dan pengembangan pertanian melakukan pemetaan kawasan cabai, bawang merah, dan jeruk nasional berdasarkan agroekosistem dan kondisi eksisting kawasan.
- KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Masterplan* Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional di wilayah kerjanya.
- KEENAM : SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Action Plan* Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional di wilayah kerjanya dengan mengacu pada *Masterplan* Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional.
- KETUJUH : Pembiayaan Pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional didukung dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), koperasi, masyarakat, dan/atau integrasi diantaranya.

- KEDELAPAN** : Direktorat Teknis dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional.
- KESEMBILAN** : Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KESEBELAS** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Pemimpin Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pertanian di Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Kpts/PD.200/1/2015
TANGGAL : 16 Januari 2015

PENETAPAN KAWASAN CABAI, BAWANG MERAH, DAN JERUK NASIONAL

a. Cabai

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. Kab. Aceh Tengah | 45. Kab. Sumedang | 89. Kab. Bolmong Timur |
| 2. Kab. Aceh Besar | 46. Kab. Purwakarta | 90. Kab. Boalemo |
| 3. Kab. Pidie | 47. Kab. Bandung Barat | 91. Kab. Gorontalo |
| 4. Kab. Tapanuli Utara | 48. Kota Tasikmalaya | 92. Kab. Bone Bolango |
| 5. Kab. Deli Serdang | 49. Kab. Pandeglang | 93. Kab. Donggala |
| 6. Kota Medan | 50. Kab. Lebak | 94. Kab. Jeneponto |
| 7. Kab. Pesisir Selatan | 51. Kota Tangerang Selatan | 95. Kab. Takalar |
| 8. Kab. Tanah Datar | 52. Kab. Purworejo | 96. Kab. Maros |
| 9. Kab. Agam | 53. Kab. Wonosobo | 97. Kab. Soppeng |
| 10. Kab. Lima Puluh Kota | 54. Kab. Magelang | 98. Kab. Pinrang |
| 11. Kab. Pasaman Barat | 55. Kab. Boyolali | 99. Kab. Enrekang |
| 12. Kota Padang | 56. Kab. Sragen | 100. Kab. Majene |
| 13. Kota Padang Panjang | 57. Kab. Grobogan | 101. Kab. Mamuju |
| 14. Kab. Siak | 58. Kab. Blora | 102. Kab. Mamuju Utara |
| 15. Kota Pekanbaru | 59. Kab. Rembang | 103. Kab. Konawe |
| 16. Kota Dumai | 60. Kab. Pati | 104. Kab. Kolaka |
| 17. Kab. Bintan | 61. Kab. Demak | 105. Kab. Konawe Selatan |
| 18. Kota Batam | 62. Kab. Pekalongan | 106. Kab. Minahasa |
| 19. Kab. Merangin | 63. Kab. Brebes | 107. Kab. Minahasa Utara |
| 20. Kab. Muaro Jambi | 64. Kota Magelang | 108. Kab. Kolaka Utara |
| 21. Kota Jambi | 65. Kab. Kulon Progo | 109. Kab. Klungkung |
| 22. Kab. Ogan Komering Ulu | 66. Kab. Bantul | 110. Kab. Buleleng |
| 23. Kab. Ogan Komering Ilir | 67. Kab. Sleman | 111. Kab. Lombok Timur |
| 24. Kab. Banyuasin | 68. Kab. Kediri | 112. Kota Mataram |
| 25. Kab. Ogan Ilir | 69. Kab. Lumajang | 113. Kab. Kupang |
| 26. Kota Palembang | 70. Kab. Jember | 114. Kab. Belu |
| 27. Kab. Belitung | 71. Kab. Banyuwangi | 115. Kab. Lembata |
| 28. Kab. Bangka Tengah | 72. Kab. Magetan | 116. Kab. Rote Ndao |
| 29. Kab. Rejang Lebong | 73. Kab. Tuban | 117. Kab. Maluku Tenggara |
| 30. Kab. Kaur | 74. Kab. Lamongan | 118. Kab. Maluku Tengah |
| 31. Kab. Mukomuko | 75. Kab. Bangkalan | 119. Kab. Seram Bagian Barat |
| 32. Kab. Lebong | 76. Kab. Melawi | 120. Kab. Seram Bagian Timur |
| 33. Kab. Kepahiang | 77. Kab. Kubu Raya | 121. Kota Ambon |
| 34. Kab. Tarnggamus | 78. Kab. Kowar Timur | 122. Kab. Halmahera Timur |

35. Kab. Lampung Selatan
36. Kab. Lampung Tengah
37. Kab. Pesawaran
38. Kab. Mesuji
39. Kab. Sukabumi
40. Kab. Cianjur
41. Kab. Bandung
42. Kab. Garut
43. Kab. Tasikmalaya
44. Kab. Ciamis

b. Bawang Merah

1. Kab. Aceh Tengah
2. Kab. Aceh Besar
3. Kab. Pidie
4. Kab. Tapanuli Utara
5. Kab. Toba Samosir
6. Kab. Simalungun
7. Kab. Humbang Hasundutan
8. Kab. Samosir
9. Kab. Pesisir Selatan
10. Kab. Agam
11. Kab. Kampar
12. Kota Pekanbaru
13. Kab. Ogan Komering Ulu
14. Kab. Ogan Komering Ilir
15. Kab. Musi Rawas
16. Kab. Banyuasin
17. Kab. Bangka Tengah
18. Kab. Tanggamus
19. Kab. Lampung Selatan
20. Kab. Lampung Tengah
21. Kab. Garut
22. Kab. Kuningan
23. Kab. Cirebon
24. Kab. Majalengka
25. Kab. Indramayu

79. Kab. Kapuas
80. Kota Palangkaraya
81. Kab. Tanah Laut
82. Kab. Tapin
83. Kota Banjarbaru
84. Kab. Kutai Kartanegara
85. Kab. Penajem Paser Utara
86. Kota Balikpapan
87. Kota Samarinda
88. Kota Tarakan

26. Kab. Purworejo
27. Kab. Grobogan
28. Kab. Rembang
29. Kab. Pati
30. Kab. Demak
31. Kab. Tegal
32. Kab. Brebes
33. Kab. Bantul
34. Kab. Probolinggo
35. Kab. Nganjuk
36. Kab. Bojonegoro
37. Kab. Bangkalan
38. Kab. Pamekasan
39. Kab. Sumenep
40. Kab. Pontianak
41. Kab. Kubu Raya
42. Kota Pontianak
43. Kab. Kapuas
44. Kota Palangkaraya
45. Kab. Tapin
46. Kab. Hulu Sungai Selatan
47. Kab. Paser
48. Kab. Minahasa
49. Kab. Donggala
50. Kab. Sigi

123. Kota Ternate
124. Kab. Merauke
125. Kab. Jayawijaya
126. Kab. Biak Numfor
127. Kab. Mimika
128. Kab. Keerom
129. Kota Jayapura
130. Kab. Sorong
131. Kab. Tambrauw
132. Kota Sorong

51. Kota Palu
52. Kab. Jenepono
53. Kab. Bone
54. Kab. Pinrang
55. Kab. Enrekang
56. Kab. Mamuju
57. Kab. Kolaka Utara
58. Kab. Bangli
59. Kab. Buleleng
60. Kab. Bima
61. Kab. Kupang
62. Kab. Lembata
63. Kab. Rote Ndao
64. Kab. Manggarai Barat
65. Kab. Maluku Tenggara
66. Kab. Buru
67. Kab. Seram Bagian Barat
68. Kab. Halmahera Barat
69. Kab. Halmahera Selatan
70. Kota Tidore Kepulauan
71. Kab. Jayawijaya
72. Kab. Teluk Wondama
73. Kab. Tambrauw

c. Jeruk

1. Kab. Aceh Tengah
2. Kab. Aceh Jaya
3. Kab. Bener Meriah
4. Kab. Tapanuli Selatan
5. Kab. Tapanuli Utara
6. Kab. Simalungun
7. Kab. Dairi
8. Kab. Karo
9. Kab. Tanah Datar
10. Kab. Agam
11. Kab. Lima Puluh Kota
12. Kab. Solok Selatan
13. Kab. Kuantan Singingi
14. Kab. Indragiri Hilir
15. Kab. Kampar
16. Kab. Kerinci
17. Kab. Tj. Jabung Barat
18. Kab. Ogan Komering Ulu
19. Kab. Ogan Ilir
20. Kab. Bangka Tengah
21. Kab. Bengkulu Utara
22. Kab. Lebong
23. Kab. Kepahiang
24. Kota Bengkulu
25. Kab. Lampung Selatan
26. Kab. Way Kanan
27. Kab. Bandung
28. Kab. Garut
29. Kab. Bandung Barat
30. Kab. Cilacap
31. Kab. Purbalingga
32. Kab. Banjarnegara
33. Kab. Pacitan
34. Kab. Malang
35. Kab. Jember
36. Kab. Banyuwangi
37. Kab. Situbondo
38. Kab. Magetan
39. Kab. Tuban
40. Kab. Lamongan
41. Kab. Sambas
42. Kab. Bengkayang
43. Kab. Pontianak
44. Kab. Kubu Raya
45. Kota Palangkaraya
46. Kab. Barito Kuala
47. Kab. Paser
48. Kab. Kutai Timur
49. Kab. Berau
50. Kab. Penajem Paser Utara
51. Kab. Bulungan
52. Kab. Nunukan
53. Kota Tarakan
54. Kab. Minahasa
55. Kab. Poso
56. Kab. Parigi Moutong
57. Kab. Kep. Selayar
58. Kab. Bulukumba
59. Kab. Bantaeng
60. Kab. Jeneponto
61. Kab. Pangkep
62. Kab. Mamuju
63. Kab. Mamuju Utara
64. Kab. Buton
65. Kab. Konawe Selatan
66. Kab. Konawe Utara
67. Kab. Gianyar
68. Kab. Bangli
69. Kab. Buleleng
70. Kab. Lombok Timur
71. Kab. Timor Tengah Selatan
72. Kab. Maluku Tengah
73. Kab. Seram Bagian Barat
74. Kab. Halmahera Tengah
75. Kota Tidore Kepulauan
76. Kab. Nabire
77. Kab. Biak Numfor
78. Kab. Mimika
79. Kab. Manokwari
80. Kab. Tambrauw

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN